

**ANALISIS SOSIOLOGI EKONOMI KELEMBAGAAN
DALAM TRANSFORMASI SOSIOKULTURAL MASYARAKAT ADAT
(Kasus Suku Duano di Provinsi Riau)**

Viktor Amrifo¹⁾

Diterima : 12 Desember 2012 Disetujui: 12 Januari 2013

ABSTRACT

This paper was aimed (1) to analyze the institutional mechanism of socio-cultural transformation of Tribe Community, and (2) to analyze the social mechanism of livelihood change of Duano Tribe. Instrumental case study was conducted to Duano Tribe in Riau Province. Results showed that (1) the socio-cultural transformation process was pushed by the resettlement program for Tribe Community in Indonesia, (2) sustainable livelihood role as incentive structure and AMAN as organizational field in the NIES frame analyses, and (3) the livelihood strategy of Duano household was maximizing the human capital of family member. Economic behavior of Duano family member was oriented by (1) share belief, (2) socially constructed meaning about welfare and money, (3) the hope of incentive structure, and (4) compliance to formal rules of Tribe Community Resettlement Policy.

Keywords: *Socio-cultural Transformation, Sustainable Livelihood, Livelihood Change, AMAN, Duano Tribe*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Artikel ini merupakan upaya penulis untuk mengkaitkan kehidupan ekonomi yang terjadi pada level individu, rumah tangga, komunitas, dan makrostruktur. Pembahasan yang bersifat multilevel seperti ini, didalam sosiologi ekonomi dikenal dengan *New Institutionalism in Economic Sociology (NIES)*. Nee (2005) mengungkapkan bahwa NIES merupakan pendekatan kelembagaan yang mengkaitkan hubungan timbal balik antara tindakan ekonomi pada aras mikro, ikatan interpersonal pada aras meso, dan mekanisme institusional pada aras makro.

Berbagai pendekatan dapat digunakan dalam membahas fenomena kehidupan ekonomi, masing-masing memiliki tradisi intelektual dengan perkembangan historis yang panjang. Jika ditelusuri sejak era klasik, sesungguhnya Karl Marx, Emile Durkheim, dan Max Weber telah melakukan pendekatan sosiologi terhadap fenomena kehidupan ekonomi. Ketiga ahli tersebut sepakat bahwa penjelasan tentang kehidupan ekonomi tidak cukup memadai jika hanya dilihat dari aspek-aspek ekonomi semata, kehidupan ekonomi harus dilihat lebih jauh melalui aspek-aspek sosiologis (sosial, politik, dan budaya).

NIES memiliki tradisi intelektual yang berbeda dengan pendekatan kelembagaan yang dikembangkan oleh ekonomi formal

¹⁾ Staf Pengajar di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau Pekanbaru

dan sosiologi organisasi. Pemikiran ketiga tokoh sosiologi klasik tersebut pula yang menjadi sumber bagi perkembangan NIES, meskipun pikiran Weber lah yang menjadi sumber utamanya. Menurut Smelser (1990) bahwa sosiologi ekonomi yang dibangun oleh Marx terutama mengkaitkan kehidupan ekonomi dengan aspek politik, sementara itu Durkheim tertarik pada proses pengintegrasian dan pengaturan kehidupan sosial dalam masyarakat industri, sedangkan Weber berupaya untuk menjelaskan bagaimana proses-proses ekonomi yang melibatkan tindakan dipengaruhi oleh pemaknaan individu atas situasi, emosi, dan budaya.

Pendekatan kelembagaan di dalam ekonomi formal atau sering disebut sebagai ekonomi kelembagaan bersumber dari tokoh-tokoh ekonomi klasik Smith, Keynes, dan Knight. Pendekatan ini juga mulai menyadari pentingnya aspek sosiologis di dalam menjelaskan kehidupan ekonomi. Menurut Nee (2005) bahwa pada tahun 1980-an ekonomi kelembagaan terus memperkaya analisisnya dengan memasukkan pandangan-pandangan Weber, Marx, Polanyi, dan Parson, sebagaimana yang terlihat dari karya Douglass C. North tentang *Structure and Change in Economic History*. Ekonomi kelembagaan pada tahap ini dikenal dengan *New Institutional Economics* (NIE).

Tradisi intelektual yang terus dijaga oleh masing-masing pendekatan, memiliki pandangan yang berbeda dalam menempatkan masyarakat dan ekonomi. Selain NIES dan NIE, pendekatan kelembagaan yang berkembang adalah *New Institutionalism in Organizational Analysis* (NIOA) di

dalam sosiologi organisasi. Dari ketiga pendekatan kelembagaan tersebut, NIES dan NIE yang membahas lebih dalam tentang hubungan masyarakat dan ekonomi.

NIE menempatkan masyarakat sebagai sesuatu yang telah ada (*given*) atau berada di luar ekonomi, sehingga lebih menekankan pada kemunculan dan evolusi kelembagaan-kelembagaan ekonomi. NIES memandang bahwa ekonomi adalah bagian integral dari masyarakat, sehingga pembahasannya menyentuh hubungan antara kelembagaan, jaringan sosial, dan norma dengan tindakan ekonomi (Smelser & Swedberg, 2005; Nee, 2005; Damsar 2009).

Analisis multilevel dalam kehidupan ekonomi masyarakat adat menjadi sangat relevan dilakukan pada saat ini, karena interalasi yang terjadi pada berbagai level dapat mengantarkan kita kepada suatu pemahaman yang komprehensif. Kebijakan *resettlement* masyarakat adat (dengan harapan terjadinya proses perubahan kehidupan yang lebih baik) dapat mendorong terjadinya transformasi sosial dan budaya pada masyarakat adat yang ada di Indonesia. Beberapa kajian sosiologi dan antropologi menemukan fakta tersebut, antara lain kajian Maunati (2004) dan Dharmawan (2001) tentang masyarakat Dayak, Suparlan (1995) tentang masyarakat Sakai, dan Zacot (2008) tentang masyarakat Bajo.

Kajian yang mengkaitkan perubahan pada aras makro dan tindakan ekonomi di Indonesia juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Geertz (1963; 1984) mengkaitkan perubahan ekologi, sosiokultural, dan tindakan ekonomi

petani Jawa. Selanjutnya Dharmawan (2001) mengkaitkan perubahan sosial ekonomi, strategi nafkah, dan tindakan ekonomi petani di pedesaan Indonesia. Kedua peneliti ini menggunakan analisis multilevel dalam menjelaskan fenomena kehidupan ekonomi petani, tetapi mereka tidak menggunakan pendekatan dalam kerangka NIES, sehingga struktur insentif dan organisasi sosial tidak dilihat terlalu jauh di dalam proses perubahan.

Analisis multilevel yang diterapkan untuk membahas hubungan antara transformasi sosiokultural, sistem kehidupan, strategi nafkah, dan tindakan ekonomi berlangsung di dalam kerangka kelembagaan yang bersifat dua arah. Jika diasumsikan bahwa kerangka kelembagaan dimulai dari aras makro yaitu adanya kebijakan yang mendorong transformasi sosiokultural, maka kebijakan tersebut harus ditelusuri lebih jauh. Mekanisme kelembagaan yang bersifat formal ini akan mempengaruhi mekanisme sosial yang terjadi pada aras meso dan mikro. Guna menjawab hal tersebut, disusunlah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme kelembagaan yang terjadi pada aras makro dari proses transformasi sosiokultural masyarakat adat?
2. Bagaimanakah mekanisme sosial yang terjadi aras meso dan mikro dalam pergeseran sistem kehidupan masyarakat adat, khususnya Suku Duano?

Tujuan Penelitian

Penelitian tentang transformasi sosiokultural masyarakat adat ini

bertujuan untuk menganalisis mekanisme kelembagaan dari proses transformasi masyarakat adat dan mekanisme sosial pergeseran sistem kehidupan Suku Duano.

METODOLOGI

Paradigma dan Strategi Penelitian

Secara umum riset kualitatif dapat diberi pengertian sebagai penelitian dengan beragam metoda, yang mencakup pendekatan interpretif dan naturalistik terhadap subjek kajiannya (Denzin dan Lincoln, 2000; Moleong, 2002; Sugiyono, 2009). Penelitian yang ini tergolong dalam penelitian kualitatif, karena penelitian ini mempelajari benda-benda di dalam konteks alaminya, serta berupaya untuk memahami dan menafsirkan fenomena yang melekat pada benda tersebut, melalui metoda yang tepat. Penelitian ini menekankan pada proses, pemaknaan subjektif atas realitas yang terbangun secara sosial, dan tidak bebas nilai.

Keyakinan mendasar atas suatu realitas, hubungan antara peneliti dan tinjauan, serta metodologi yang dapat memandu di dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Transformasi sosiokultural masyarakat adat merupakan suatu realitas yang harus dipahami dalam konteks alaminya dan ditafsirkan lebih jauh.

Penelitian ini menggunakan strategi penelitian studi kasus. Studi kasus dalam penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti suatu kasus yang terjadi pada masyarakat tertentu dalam hal ini Suku Duano di Indragiri Hilir. Kasus yang diambil adalah untuk memudahkan pemahaman tentang transformasi sosiokultural masyarakat adat dengan perspektif yang digunakan. Melalui

analisis multilevel diharapkan akan dapat mengembangkan perspektif sosiologi ekonomi kelembagaan. Studi kasus seperti ini dikelompokkan oleh Stake (2010) sebagai studi kasus instrumental (*instrumental case study*).

Uji kredibilitas data (kepercayaan) dilakukan dengan pengamatan yang seksama (waktu, intensitas), peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi (sumber, teknik, waktu), diskusi (pakar, sejawat), analisa kasus negatif, dan *member check*. Transferabilitas hasil penelitian diupayakan dengan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan logis.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Beberapa desa yang dipilih sebagai tempat wawancara dan pengamatan adalah Desa Panglima Raja, Desa Concong Luar, Desa Tanjung Pasir, dan Desa Kuala Patah Parang. Desa-desa tersebut merupakan sebagian dari desa tempat bermukimnya Suku Duano

Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dua jenis, yaitu: data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan dua teknik, yaitu: teknik observasi (*observation*), dan wawancara (*interview*). Sementara data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi dokumen.

Analisis dan Interpretasi Data

Interpretasi adalah hal terpenting di dalam penelitian yang bekerja mengikuti paradigma konstruktivisme. Interpretasi merupakan konstruksi terhadap

pembacaan peristiwa-peristiwa di lapangan penelitian menuju ke teks (narasi), melalui dialektika antara peneliti dan tinjauan dan antara paradigma/teori dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Data yang telah dapat diakui keabsahannya diinterpretasi sesuai dengan tujuan penelitian.

Data yang diperoleh dari pengamatan berperan serta dan wawancara dianalisis melalui kerangka multilevel dengan pendekatan sosiologi ekonomi kelembagaan. Interpretasi terhadap data yang dikumpulkan didialogkan pula dengan teori *embeddedness* dari Granovetter. Menurut Granovetter, bahwa tindakan ekonomi merupakan tindakan yang disituasikan secara sosial dan melekat (*embedded*) pada jaringan sosial personal yang sedang berlangsung diantara para aktor. Hal tersebut tidak hanya terbatas pada tindakan aktor secara individu saja, tetapi mencakup pula perilaku ekonomi yang lebih luas, seperti penetapan harga dan institusi-institusi ekonomi. Semua itu terpendam di dalam suatu jaringan hubungan sosial (Granovetter, 1992; Damsar, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pelembagaan

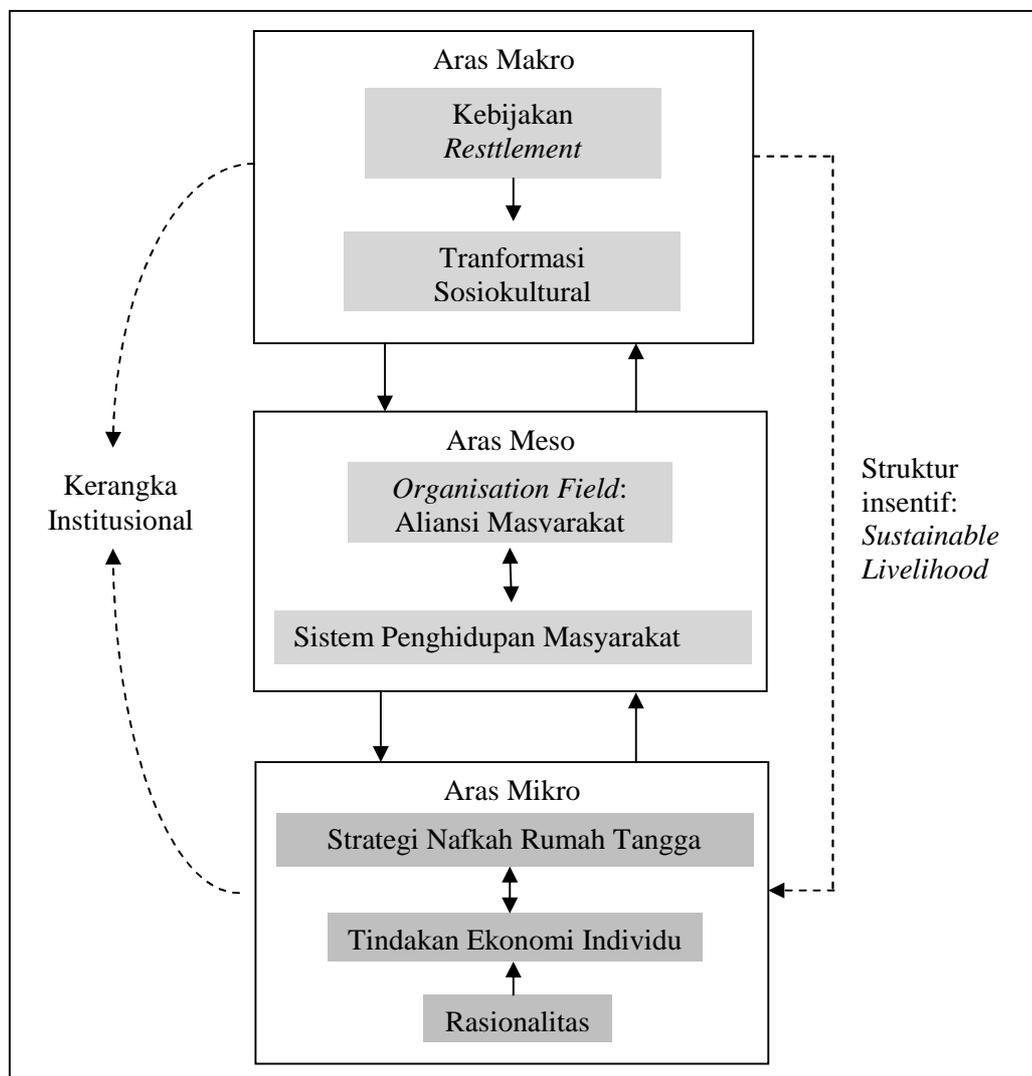
Hal-hal penting yang perlu ditinjau dari mekanisme pelembagaan di dalam transformasi sosiokultural masyarakat adat adalah:

1. Kebijakan yang mendorong proses transformasi sosiokultural masyarakat adat
2. Bentuk organisasi masyarakat adat dan struktur insentif dari proses transformasi sosiokultural

NIES memandang kelembagaan sebagai suatu sistem

dominan dari hubungan timbal balik antara elemen-elemen formal dan informal (adat istiadat, keyakinan bersama, konvensi, norma, dan aturan), yang diorientasikan oleh tindakan aktor-aktor ketika mereka berusaha mencapai kepentingannya. Kelembagaan berfungsi sebagai struktur sosial yang menyediakan saluran bagi tindakan kolektif, yaitu dengan memfasilitasi dan mengorganisasikan kepentingan aktor-aktor dan mendorong

munculnya hubungan prinsipal diantara agen. Definisi ini menunjukkan bahwa perubahan kelembagaan melibatkan aturan-aturan formal dan penataan kembali kepentingan, norma, dan kuasa. Sehingga sebelum sampai pada pembahasan tentang kebijakan yang mendorong, perlu digambarkan kerangka institusional dari interrelasi berbagai elemen pada level yang berbeda, sebagaimana Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Institusional Transformasi Sosiokultural Masyarakat Adat

Transformasi sosiokultural yang terjadi pada masyarakat adat

didorong oleh kebijakan *resettlement* masyarakat adat. Kebijakan

resettlement masyarakat adat adalah proyek modernitas hampir diseluruh belahan bumi yang menjalankan pembangunan dengan orientasi pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), termasuk Indonesia. Kebijakan ini dimulai pada orde baru yang dikenal dengan program Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing (PKMT).

Pemerintah orde baru mendefinisikan masyarakat terasing sebagai kelompok-kelompok penduduk yang tinggal atau mengembara di daerah-daerah yang jauh secara geografis dan terasing secara sosial dan budaya. Asumsinya adalah bahwa kelompok-kelompok semacam ini relatif terbelakang bila dibandingkan dengan orang-orang Indonesia pada umumnya. Cara dan gaya hidup masyarakat adat dipandang sebagai terbelakang dan tak beradab. Program relokasi menunjukkan bahwa negara sedang berusaha untuk mendefinisikan dan menentukan gaya dan cara hidup warga negaranya yang hidup lebih terpencil. Pandangan-pandangan tentang modern vs tradisional, maju vs terbelakang, diolah kembali untuk membenarkan program relokasi penduduk ini. Proses ini diistilahkan oleh Geertz (1984) sebagai *The modernity of tradition*, karena pemerintah memandang gaya dan cara hidup (budaya) yang dijalankan masyarakat adat dapat menjadi penghambat (*culture as barrier*) pembangunan.

Sebagian besar masyarakat adat merupakan bagian dari PKMT, baik yang tinggal di hutan, pegunungan, laut, dan pantai. Suku Bajo yang hidup mengembara di laut di relokasi ke pulau-pulau karang dan pesisir pantai (Zacot, 2008). Suku Sakai yang hidup di pedalaman

hutan Riau direlokasi ke pinggiran-pinggiran hutan (Suparlan, 1995). Suku Dayak yang hidup di pinggiran DAS dan hutan terpencil Kalimantan direlokasi ke daerah-daerah yang lebih terjangkau (Maunati, 2008). Begitu pula Suku Duano yang pada awalnya hidup di rumah-rumah perahu, dimukimkan kembali di desa-desa pantai dan muara sungai Indragiri Hilir Provinsi Riau. Mereka tidak saja direlokasi, tetapi dimaksudkan untuk berubah (bertransformasi) menjadi manusia-manusia yang diistilahkan sebagai manusia pembangunan. Upaya pemerintah untuk mempercepat transformasi kehidupan sosial dan budaya masyarakat adat yaitu dengan membaurkan mereka dengan masyarakat lain (dalam ukuran pemerintah yang tidak terasing).

PKMT dalam kacamata NIES adalah lingkungan kelembagaan, yaitu aturan regulasi formal yang dimonitor dan ditegakkan oleh negara melalui Departemen Sosial ditingkat pusat dan daerah untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat adat. Kehidupan masyarakat adat adalah sesuatu yang unik, karena menyangkut suatu sistem sosiokultural yang holistik. Sistem sosiokultural yang dijalankan masyarakat adat yang hidup pada suatu wilayah selalunya terdiri dari golongan-golongan (klen) dengan kekerabatan yang masih kuat. Mereka mengembangkan kelembagaan sosial-ekonomi-budaya-politik untuk pemenuhan kebutuhan subsistensi yang sangat tergantung pada ketersediaan sumberdaya di alam. Mereka juga menjalankan bentuk ritus-ritus yang menjadi simbol kepercayaan bersama.

Sistem sosiokultural masyarakat adat yang berbeda-beda dan memiliki kekhasan sesuai dengan lingkungan biofisik yang tersebar di daerah-daerah pedalaman inilah yang menjadi proyek modernitas. Sistem sosiokultural masyarakat adat yang menurut kriteria Sanderson (2003) adalah masyarakat pra kapitalis pada tahapan berburu dan meramu atau

hortikultura sederhana, akan ditransformasi pada tahapan masyarakat hortikultura intensif dan agrarisme. Transformasi sosiokultural masyarakat adat yang diinginkan oleh pemerintah, jika dikelompokkan berdasarkan pola kepemilikan, distribusi, dan pertukaran dapat dijelaskan dengan konsepsi Sanderson (2003), seperti Tabel 1

Tabel 1. Pola Pemilikan, Distribusi, dan Pertukaran pada Sistem Sosiokultural Pra Kapitalis

Tahapan Sistem Sosiokultural Pra Kapitalis	Pola Pemilikan	Pola Distribusi	Pola Pertukaran
Berburu dan Meramu	Sumberdaya-sumberdaya penting yang menopang hidup bersama dimiliki oleh seluruh komunitas	Resiprositas yang bersifat general, berbagi dengan kemurahan hati.	Proses pertukaran sudah terjadi, pasar tidak ada.
Hortikultura Sederhana	Kepemilikan oleh keluarga besar.	Redistribusi murni atau egaliter. Pemimpin bertanggung jawab mengatur distribusi.	Proses pertukaran sudah terjadi, pasar tidak ada.
Hortikultura Intensif	Kepemilikan lahan dikuasai oleh pemimpin, produsen dapat mengelola lahan secara otonom.	Redistribusi parsial atau berstratifikasi.	Pasar ada dan cukup penting, tetapi lebih bersifat sekunder.
Agrarisme	Lahan dimiliki dan dikuasai sekelompok tuan tanah, atau aparat pemerintah yang kuat, berfungsi untuk kepentingan tuan tanah.	Hubungan yang sangat tidak seimbang dan eksploitatif antara tuan tanah dan produsen utama.	Pasar ada dan cukup penting, dan bersifat primer.

Sumber: Sanderson (2003)

Sistem penghidupan (*livelihood system*) yang memiliki interrelasi dengan proses transformasi (Gambar 1) merupakan kelembagaan yang mengatur pola-

pola produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat adat untuk memenuhi kebutuhan subsistensi. Sistem penghidupan masyarakat adat diatur secara informal yang

bersumber dari adat-istiadat, jaringan, norma, dan keyakinan kultural yang mereka jalankan. Mekanisme pelebagaan yang mempertemukan antara aturan regulasi formal PKMT (lingkungan kelembagaan) dengan aturan-aturan informal (sistem penghidupan) adalah dialog dan lobi yang diwakili oleh organisasi (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN).

Kebijakan pemerintah disosialisasikan atau diturunkan kepada masyarakat adat melalui AMAN, dan sebaliknya AMAN menyuarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat adat. AMAN juga berfungsi untuk mempengaruhi dan melobi aturan-aturan formal yang berkaitan dengan kehidupan sosial-ekonomi-budaya-politik masyarakat adat. Salah satu contoh peran dari AMAN adalah dalam penyusunan RUU "Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat".

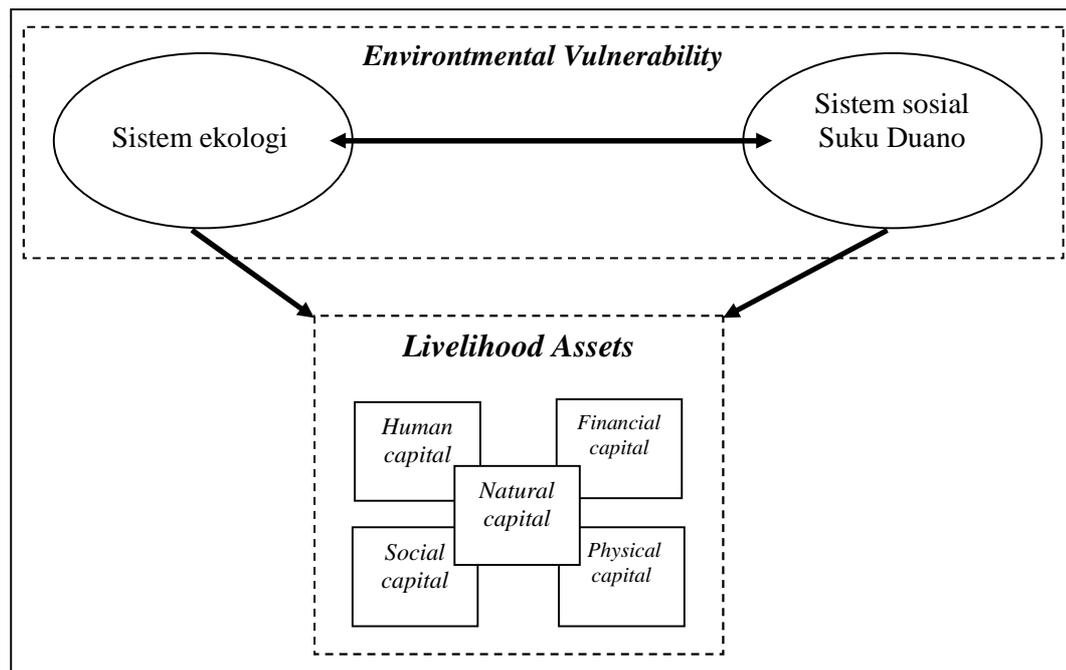
Struktur insentif yang berkaitan dengan sistem penghidupan masyarakat adat yang dihasilkan dari mekanisme kelembagaan adalah penghidupan yang berkelanjutan (*sustainable livelihood*). Struktur insentif inilah yang mempengaruhi tindakan ekonomi individu dalam menjalankan strategi nafkah rumah tangga dan aturan-aturan informal sistem penghidupan komunitas mereka. Penghidupan masyarakat yang berkelanjutan di dalam RUU

Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat diatur pada Bab IV (Hak-hak Masyarakat Adat) dan Bab V (Tanggung Jawab Pemerintah).

Sustainable livelihood adalah konsep yang dikembangkan oleh sosiologi ekonomi Mazhab Sussex. Suatu sistem penghidupan dipandang berkelanjutan apabila mampu melakukan adaptasi atau penyesuaian terhadap *shock and stress* (kejutan dan tekanan) berupa penurunan stok kapital dari sumber-sumber nafkah atau *livelihood assets* (Chambers & Conway, 1991; Dharmawan, 2007; Twig, 2007). Sistem penghidupan masyarakat adat dipandang berkelanjutan, jika mereka mampu mengakses, memanfaatkan, dan mengatur sumber-sumber penghidupan dalam program PKMT.

Mekanisme Sosial dari Pergeseran Sistem Penghidupan Suku Duano

Sistem penghidupan terdiri dari mekanisme ekologi dan mekanisme sosial. Mekanisme ekologi merupakan pola adaptasi terhadap lingkungan bio-fisik dalam mengelola sumber-sumber alam, sedangkan mekanisme sosial menyangkut pengaturan pola-pola produksi, distribusi, dan konsumsi. Keberlanjutan sistem penghidupan tergantung bagaimana kerentanan (*vulnerability*) biofisik dan sosial dapat diatasi (Gambar 2).



Gambar 4. Sistem Penghidupan Masyarakat Adat Suku Duano

Masyarakat Suku Duano yang tersebar di beberapa desa di Indragiri Hilir Provinsi Riau menjalankan sistem penghidupan yang berbasis sumberdaya perikanan dengan teknik tradisional, salah satu yang paling dikenal adalah *menongkah*. *Menongkah* adalah mengumpulkan kerang dengan teknik tradisional di hamparan lumpur dengan alat bantu luncur (*tongkah*). Selain mengumpulkan kerang Suku Duano juga mengumpulkan siput, menangkap udang (yang terkenal adalah udang nenek), dan menangkap ikan. Kegiatan pemanfaatan sumberdaya perikanan masih sangat tergantung pada kondisi alam, terutama pasang-surut air laut, cuaca, dan musim. Potensi sumberdaya alam yang tinggi khususnya perikanan tidak sebanding dengan teknik dan sumberdaya manusia yang tersedia. Mereka menjalani kehidupan dengan tingkat solidaritas tinggi, yang tercermin dari

bagaimana mereka hidup saling tolong menolong (etika altruisme).

Sistem penghidupan masyarakat Suku Duano mengalami pergeseran khususnya dalam hal orientasi ekonomi. Setelah Suku Duano dimukimkan kembali dengan pola yang membaaur dengan masyarakat Non Suku Duano, orientasi ekonomi mereka bergeser dari sekedar untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga kepada orientasi profit. Orang Duano saat ini tidak lagi hanya menjadi nelayan, beberapa diantara mereka telah ikut mengambil peran dalam kegiatan pemasaran hasil perikanan, yaitu sebagai agen atau pedagang pengumpul ikan.

Orientasi nelayan Suku Duano dalam menangkap ikan saat ini pun telah bergeser menjadi bagaimana mana mereka dapat menghasilkan uang dari hasil tangkapannya, bukan lagi untuk konsumsi rumah tangga semata. Ikan, udang, atau kerang yang

digunakan untuk konsumsi saat ini selalunya yang bernilai jual rendah di pasar, sedangkan yang bernilai ekonomis penting telah mereka uangkan (dijual). Pergeseran orientasi ekonomi ini menyebabkan kelestarian sumberdaya perikanan dapat terganggu, diantaranya adalah kerang-kerang yang selayaknya tidak diambil karena masih berukuran kecil, digunakan untuk konsumsi rumah tangga atau dijual di pasar desa. Hal ini terjadi karena kerang-kerang ukuran besar yang masuk dalam grade pasar antar pulau maupun antar provinsi tidak lagi untuk dikonsumsi rumah tangga Suku Duano. Meskipun saat ini produksi kerang masih cukup tinggi, jika hal tersebut terus terjadi dan tidak diantisipasi, *stock* kerang di alam akan mengalami kelebihan tangkap (*over fishing*).

Pergeseran sistem kehidupan masyarakat adat Suku Duano tersebut menunjukkan bahwa mereka mulai masuk pada tahapan masyarakat hortikultura intensif atau agrarisme (mengacu pada sistem sosiokultural, Tabel 1). Strategi nafkah pada aras rumah tangga nelayan Duano ikut mengalami penyesuaian terhadap aturan-aturan informal (keyakinan bersama, norma, dan adat-istiadat) dalam sistem kehidupan yang baru. Rumah tangga mulai menjalankan strategi nafkah dengan beragam sumber pendapatan dan tidak terbatas hanya pada aktivitas *menongkah*.

Pergeseran keyakinan bersama dalam memandang kehidupan, terutama yang berkaitan dengan nilai uang dan orientasi produksi dalam sistem kehidupan masyarakat Duano, kondisi ini berpengaruh pada pengoptimalan sumberdaya manusia (tenaga kerja)

rumah tangga dalam menjalankan strategi nafkah. Terdapat beberapa pola strategi nafkah pada aras rumah tangga Duano, yaitu:

- Strategi nafkah berdasarkan pengalokasian sumberdaya manusia. Strategi ini berupa jasa perahu penyeberangan dan anak buah speedboat. Jasa perahu penyeberangan dilakukan oleh kaum laki-laki remaja atau dewasa yang tidak sedang melaut atau menangkap ikan, mereka menyeberangkan penduduk yang hendak ke pasar atau anak-anak yang akan berangkat sekolah, misalnya dari Desa Concong Luar ke Panglima Raja.
- Strategi nafkah berdasarkan pengembangan aset dan investasi. Strategi ini dilakukan oleh dari rumah tangga Duano starata atas, yaitu dengan membuka kios-kios penampungan kerang dan hasil laut lainnya, jasa pembuatan perahu/kapal, dan jasa transportasi sungai/laut.
- Strategi nafkah dengan pekerjaan sambilan. Strategi ini dilakukan oleh perempuan dari rumah tangga Duano dalam bentuk pengolahan pasca panen hasil perikanan, seperti kerupuk ikan dan ebi.

Perilaku (tindakan) ekonomi individu dari anggota rumah tangga Duano yang melakukan aktivitas ekonomi dibungkus didalam norma “maksimalisasi kesejahteraan”, yang tergantung pada struktur insentif dan kepatuhan pada aturan formal. Sebagaimana tindakan ekonomi nelayan dalam aktivitas *menongkah*, kepentingan dan preferensinya didorong oleh nilai bersama (*share belief*) dan pemaknaan bersama

(*socially constructed meaning*) tentang kesejahteraan dan uang, harapan tercapainya insentif berupa *sustainable livelihood*, serta kepatuhannya terhadap kebijakan PKMT.

Perilaku individu melekat dengan nilai-nilai bersama tentang kesejahteraan yang semakin membutuhkan *financial capital* (uang) untuk mendukung penurunan *natural capital* (kualitas perairan sungai dan laut). Individu yakin atas struktur insentif yang bersumber dari PKMT (lingkungan kelembagaan) karena terdapat organisasi yang menyuarakan nilai-nilai bersama yang melekat pada tindakan ekonominya.

Perilaku ekonomi individu-individu yang menjalankan berbagai strategi nafkah di dalam rumah tangga-rumah tangga Duano menentukan apakah sistem kehidupan masyarakat Duano akan tetap dipertahankan, berubah total, atau mengalami penyesuaian. Proses ini di dalam kerangka NIES menunjukkan bekerjanya mekanisme kelembagaan dari aras mikro menuju aras makro. Jika sistem kehidupan masyarakat Duano menyesuaikan dengan apa yang diharapkan di dalam program PKMT, maka dialog atau lobi yang dilakukan antara organisasi (AMAN) dengan pemerintah tentang aturan formal dan informal akan semakin mudah. Semakin dekat jarak antara aturan formal dengan aturan informal maka semakin lancar proses penyusunan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat.

Rasionalitas yang mendasari tindakan ekonomi individu didalam menjalankan strategi nafkah rumah tangga, tidak semata-mata atas pertimbangan kepentingan (*interest*)

untuk memperoleh atau mencapai pemenuhan kemanfaatan sarana benda (*material interest*) atas dirinya sendiri, tetapi juga atas kebiasaan (*habits*) masyarakat Duano dalam memenuhi kebutuhan, serta ikatan emosi yang kuat pada masyarakat Duano.

Rasionalitas individu-individu nelayan Duano terikat dengan konteks dan melekat (*embedded*) di dalam ikatan interpersonal mereka (*context bound rationality*). Rasionalitas yang mendasari tindakan ekonomi individu nelayan Duano terikat dengan konteks pencapaian kehidupan berkelanjutan dan melekat dalam rasionalisme dominan yang mendasari tindakan individu-individu lainnya. Semakin sistem kehidupan mereka mengakomodir sistem kehidupan modern semakin dominan bekerjanya rasionalitas formal diatas rasionalitas moral didalam alam pikiran individu-individu nelayan Duano.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Transformasi sosiokultural masyarakat adat di Indonesia awalnya didorong oleh kebijakan pemerintah melalui program pemukiman kembali masyarakat terasing (PKMT). Struktur insentif yang terbentuk dari program PKMT yang berkaitan dengan sistem kehidupan masyarakat adat adalah sistem kehidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*). PKMT mendorong terbentuknya organisasi masyarakat adat di Indonesia, yaitu aliansi masyarakat adat nusantara (AMAN). Salah satu peran AMAN dalam menyuarakan aspirasi masyarakat adat adalah dalam proses penyusunan RUU "Pengakuan dan

Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat”.

Transformasi sosiokultural adat mendorong masyarakat adat masuk pada tahapan hortikultura intensif dan agrarisme, yang ditandai oleh adanya pergeseran pola pemilikan, distribusi, dan pertukaran. Pemilikan komunal bergeser menjadi pemilikan individu, distribusi yang diatur sepenuhnya oleh pemimpin dan mengedepankan etika altruisme bergeser menjadi distribusi yang bersifat parsial atau berstratifikasi, serta pertukaran yang semakin bergantung pada pasar meskipun masih bersifat sekunder.

Strategi nafkah rumah tangga Duano dilakukan dengan melakukan kegiatan perikanan dan non perikanan. Strategi nafkah dilakukan dengan memaksimalkan *human capital* rumah tangga untuk memperoleh tambahan *finansial capital*. Bentuk strategi nafkah rumah tangga Duano dalam kegiatan non perikanan adalah jasa perahu penyeberangan dan anak buah kapal.

Perilaku (tindakan) ekonomi individu dalam menjalankan strategi nafkah rumah tangga nelayan Duano dibungkus didalam nilai bersama (*share belief*) dan pemaknaan bersama (*socially constructed meaning*) tentang kesejahteraan dan uang, harapan tercapainya insentif berupa *sustainable livelihood*, serta kepatuhannya terhadap kebijakan PKMT. Rasionalitas yang mendasari tindakan ekonomi individu terikat dengan konteks *sustainable livelihood* dan melekat (*embedded*) di dalam ikatan interpersonal mereka (*context bound rationality*).

Saran

Beberapa proposisi yang dapat dimunculkan untuk

pengembangan teori bagi penelitian lanjutan dalam pendekatan NIES yang spesifik pedesaan adalah sebagai berikut:

- Pemaksimalan *financial capital* dan *human capital* di dalam strategi nafkah rumah tangga adat mendorong masyarakat adat menjalankan sistem penghidupan yang adaptif terhadap modernisasi tradisi.
- Semakin sistem penghidupan masyarakat adat mengakomodir sistem penghidupan modern, semakin dominan bekerjanya rasionalitas formal diatas rasionalitas moral didalam alam pikiran individu-individu orang adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Chambers R, Conway GR. 1991. *Sustainable Rural Livelihood: Practical Concepts for 21st Century*. IDS Discussion Paper No. 296. IDS, Sussex.
- Damsar. 2009. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Denzin, NK, Lincoln YS. 2000. *Handbook of Qualitative Research: Second Edition*. California: Sage Publications, Inc.
- Dharmawan AH. 2001. *Farm Household Livelihood Strategies and Socio-economic Changes in Rural Indonesia*. Göttingen: Goerge August University of Göttingen.
- Dharmawan, AH. 2007. *Sistem Penghidupan dan Nafkah Pedesaan: Pandangan Sosiologi Nafkah (Livelihood)*

- Sociology) Mazhab Barat dan Mazhab Bogor. Sodality I (2):169-192.*
- Geertz, C. 1963. Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia. Penerjemah: Supomo S. Diterjemahkan dari *Agriculture Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Geertz C. 1984. *Culture and Social Change: The Indonesian Case*. Man 19(4):511-532.
- Granovetter MS. 1992. Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. Granovetter MS, Swedberg R (editor). in *The Sociology of Economic Life*. Boulder, San Francisco, and Oxford: Westview Press.
- Maunati Y. 2004. *Identitas Dayak: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: LKiS.
- Moleong LJ. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nee V. 2005. The New Institutionalism in Economics and Sociology. Smelser NJ, Swederg R (editors). in *The Handbook of Economic Sociology*. New Jersey: Princeton University Press and New York: The Russell Sage Foundation.
- Sanderson SK. 2003. Sosiologi Makro. Wajidi F, Menno S, Penerjemah. Jakarta: Rajawali Pers. Terjemahan dari: *Macrosociology*.
- Smelser J. 1990. Sosiologi Ekonomi. Ali H (penerjemah). Jakarta: Wirasari. Terjemahan dari *The Sociology of Economic Life*.
- Smelser J, Swedberg R. 2005. Introducing Economic Sociology. Smelser NJ, Swederg R (editors). in *The Handbook of Economic Sociology*. New Jersey: Princeton University Press and New York: The Russell Sage Foundation.
- Stake RE. 2000. Case Studies. Di dalam Denzin NK, Lincoln YS, Editor. *The Handbook of Qualitative Research*. California: Sage Publication.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suparlan P. 1995. *Orang Sakai di Riau: Masyarakat Terasing dalam Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Twig J. 2007. *Tools for Mainstreaming Disaster Risk Reduction*. Switzerland, Provention Consortium. www.proventionconsortium.org
- Zacot FR. 2008. *Orang Bajo Suku Pengembara Laut: Pengalaman Seorang Antropolog*. Laure FM, Pranoto IB, Penerjemah. Jakarta: KPG bekerjasama dengan École Française d'Extrême-Orient dan Forum Jakarta-Paris. Terjemahan dari *Peuple nomade de la mer: Les Badjos d'Indonésie*.